

BUKU I

Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2018



RINGKASAN
EKSEKUTIF



IKPLHD

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH



Jl. Menteri Supeno No.10, Manahan,
Banjarsari, Kota Surakarta,
Jawa Tengah 57139



PERNYATAAN PERUMUSAN ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan adanya dokumen IKPLHD ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan uraian secara jelas dan benar mengenai data dan informasi isu prioritas lingkungan Kota Surakarta serta pengelolaannya dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Sehubungan dengan hal tersebut, saya menyatakan bahwa Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kota Surakarta Tahun 2018, disusun memuat isu prioritas daerah yang didasarkan pada proses partisipatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan di Kota Surakarta yang meliputi unsur-unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Perguruan Tinggi dan Lembaga Masyarakat. Isu – isu lingkungan hidup di Kota Surakarta Tahun 2018 berdasarkan prioritasnya meliputi: (1) tata guna lahan, (2) pencemaran air dan udara, (3) sampah, (4) kemacetan lalu lintas, dan (5) banjir genangan. Demikian Surat Pernyataan Perumusan Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah Kota Surakarta Tahun 2018 ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kota Surakarta Tahun 2018 dapat diselesaikan dengan baik. Diharapkan, dokumen ini dapat dimanfaatkan bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kota Surakarta sebagai bahan kajian dan memutuskan kebijakan dalam melanjutkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan di Kota Surakarta. Tujuan dari penulisan dokumen ini adalah untuk memberikan gambaran dan uraian secara jelas mengenai data dan informasi berdasarkan isu prioritas lingkungan serta inisiatif yang dilakukan pemerintah Kota Surakarta dalam upaya perbaikan kualitas lingkungan, perbaikan kualitas sumber daya alam dan perbaikan tata kelola lingkungan. Apresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh Tim IKPLHD dan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang telah mendukung penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kota Surakarta Tahun 2018. Kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan Dokumen ini. Semoga Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Surakarta Tahun 2018 ini bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN PERUMUSAN ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iii
I. PENDAHULUAN	1
II. ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	4
III. ANALISIS PRESSURE, STATE DAN RESPONSE TERHADAP ISU - ISU LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA SURAKARTA	5
IV. INOVASI DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	14
V. PENUTUP	16



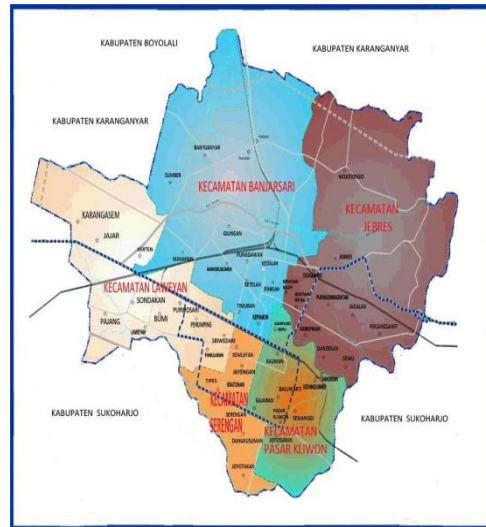
Ringkasan Eksekutif

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (IKPLHD) KOTA SURAKARTA TAHUN 2018

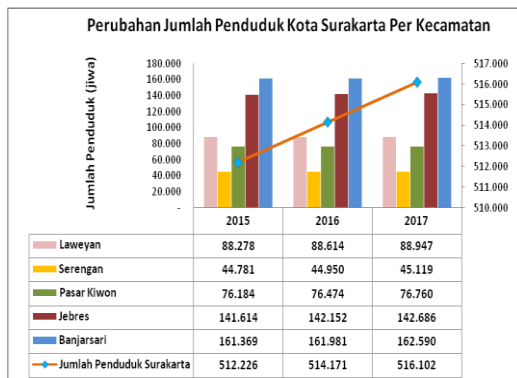
I. PENDAHULUAN

Kota Surakarta secara astronomis terletak pada 110°45'15" - 110°45'35" bujur timur dan antara 7°36' - 7°56' lintang selatan. Kota Surakarta merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah memiliki luas wilayah keseluruhan sebesar 44.04 Km² (±0,13%) luas wilayah Propinsi Jawa Tengah.

Posisi strategis Kota Surakarta menjadikan kota ini ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional dan kawasan andalan Provinsi Jawa Tengah yang diharapkan menjadi pusat pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, wilayah bagian selatan yang meliputi, Kota Surakarta, Kab. Boyolali, Kab. Sukoharjo, Kab. Wonogiri, Kab. Sragen dan Kab. Klaten atau dikenal dengan sebutan Subosukowonosraten. Disamping itu kota



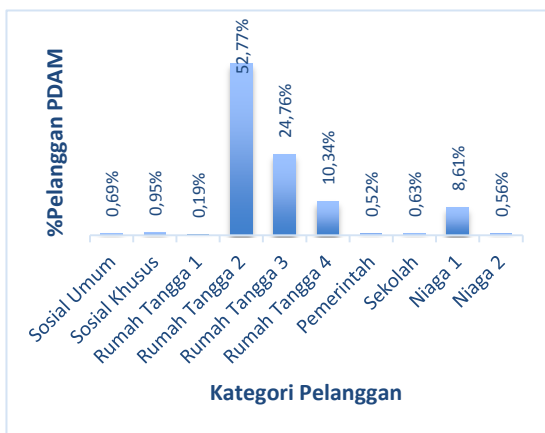
Surakarta juga berada dalam wilayah perkembangan ekonomi Segitiga Joglosemar (Yogyakarta – Solo – Semarang).



Jumlah penduduk Kota Surakarta pada tahun 2017 berdasarkan data BPS berjumlah 516.102 jiwa, dengan luas wilayah yang relatif kecil Kota Surakarta menjadi salah satu kota dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi sebesar 11.718 jiwa/km².



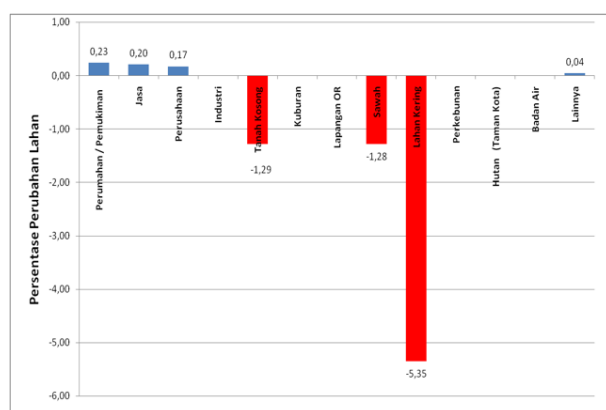
Kondisi fisik dan geografis Kota Surakarta Wilayah Surakarta memiliki topografi relatif datar dengan 80,3% dengan kemiringan 0-2%, sedangkan sisanya (19,7%) merupakan lahan bergelombang dengan gradien kemiringan 2-15% (Bapedda, 2017). Kota Surakarta beriklim tropis dan bertemperatur sedang dengan suhu udara berkisar antara 26,02 °C - 28,20 °C, Sedangkan kelembaban udara berkisar antara 69 persen - 87 persen.



Sumber daya Air di Kota Surakarta terdiri dari 2 yaitu :**(a) Air Tanah**, Wilayah Kota Surakarta memiliki sumber daya air tanah yang menjadi bagian Cadangan Air Tanah (CAT) Karanganyar-Boyolali, pada formasi Notopuro, yang memiliki luas 3.877 km². **(b) Air Permukaan**, Badan air permukaan yang dimiliki Kota Surakarta

adalah sungai. Terdapat sembilan sungai di Kota Surakarta antara lain, Bengawan Solo, Kali Anyar, Pepe Hilir, Pelem Wuluh, Kali Gajah Putih, Kali Wingko, Pepe Hulu, dan Kali Jenes. Aliran air sungai yang melalui Kota Surakarta pada akhirnya bermuara di Sungai yang terbesar yaitu Sungai Bengawan Solo. Adapun penggunaan air di Kota Surakarta seperti gambar di atas.

Tata guna lahan di Kota Surakarta Tahun 2017 adalah permukiman (65,51%), Jasa (8,89%), lain - lain (7,77%), Perusahaan (5,60%), Tanah Kosong (2,46%), Industri (2,23%), Tegalan (2,19%), Sawah (2,15%), Kuburan (1,56%), Lap. Olah Raga (1,36%), dan Taman Kota hanya sebesar 0,27%. Penggunaan lahan permukiman terbesar terletak pada Kec. Banjarsari dan Jebres, Penggunaan Jasa dan industri terbesar terletak pada Kec. Jebres dan Laweyan, penggunaan tegalan, tanah kosong, dan taman kota terbesar terletak pada Kec. Jebres dan Banjarsari, sedangkan

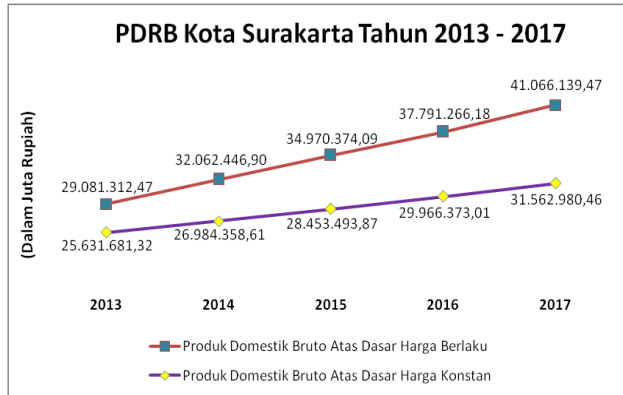




Ringkasan Eksekutif Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Surakarta Tahun 2018

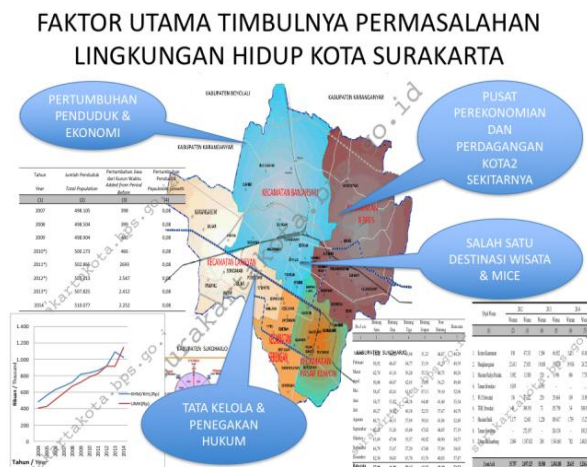


Kec. Serengan dan Pasar Kliwon tidak memiliki taman kota. Adapun perubahan lahan di Kota Surakarta seperti yang terlihat pada gambar di atas.



Pada tahun 2017 Kota Surakarta mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,33 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sektor Konstruksi memberikan sumbangan tertinggi yaitu sebesar 26,71 persen. Dengan meningkatnya PDRB di Kota Surakarta secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat dan diharapkan dapat mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Surakarta. Dengan naiknya kesejahteraan masyarakat selain kebutuhan primer yang telah tercukupi, maka juga akan dapat meningkatkan kebutuhan sekunder ataupun tersier. Efek meningkatnya kebutuhan sekunder ataupun tersier masyarakat sebagai contoh adalah meningkatnya jumlah motor roda dua ataupun mobil, meningkatnya kebutuhan akan gaya hidup (life style) dengan semakin banyaknya mall / Pusat perbelanjaan, meningkatnya kebutuhan hiburan (entertainment), hotel, wisata dan wisata kuliner. Hal tersebut dapat mengakibatkan meningkatnya tekanan terhadap lingkungan pada sisi kebutuhan alih fungsi lahan, kemacetan dan timbulan sampah.

Aktivitas perekonomian yang dominan di Surakarta adalah perdagangan, jasa dan pariwisata yang diselaraskan dengan cita-cita Surakarta menjadi kota MICE (meeting, incentives, convention and exhibition) dan kota budaya. Hal tersebut selaras dengan pesatnya pembangunan dan investasi di





Surakarta saat ini. Kondisi ini tentunya akan juga memberikan dampak sisi negatif bagi Kota Surakarta, yaitu tekanan lingkungan yang diterima akan semakin membesar.

Untuk membantu perumusan kebijakan terutama terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di Kota Surakarta, diperlukan suatu sarana penyediaan data dan informasi mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kota Surakarta Tahun 2018 disusun untuk menjelaskan kondisi aktual lingkungan (*state*), tekanan terhadap lingkungan (*pressure*), dan upaya-upaya yang dilakukan guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup (*response*). Proses penyusunan Dokumen IKPLHD dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang meliputi pembentukan tim penyusun, pembagian tugas, penentuan isu prioritas dengan melibatkan masyarakat melalui FGD, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data dengan pendekatan *Pressure-State-Response* (PSR).

II. ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP

Penentuan isu prioritas lingkungan hidup didasari pada permasalahan lingkungan hidup yang telah, sedang dan/atau akan dialami. Pada umumnya permasalahan lingkungan hidup menyangkut dimensi yang luas, yaitu lintas ruang/wilayah, lintas pelaku/sector, dan lintas generasi. Penentuan isu prioritas pada dokumen IKPLHD Kota Surakarta dilakukan dengan pertimbangan:

- Mendapat perhatian publik yang luas dan aktual
- Perlu ditangani segera
- Sesuai kebutuhan masyarakat
- Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi
- Potensi menimbulkan dampak kumulatif dan efek berganda terhadap masyarakat/publik.



Sumber : DLH Kota Surakarta, 2018

Penetapan isu prioritas didasarkan pada proses partisipatif melalui *FocusGroup Discussion* (FGD) yang dilaksanakan pada hari Senin, 27 Agustus 2018 dengan melibatkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Perguruan Tinggi dan LSM lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil FGD, diperoleh urutan isu prioritas:

- 1) Tata Guna Lahan
- 2) Pencemaran Air dan Udara
- 3) Sampah
- 4) Kemacetan Lalu lintas
- 5) Banjir Genangan

Isu prioritas lingkungan hidup yang telah ditetapkan akan diintegrasikan kedalam analisis *Pressure, state* dan *response*, untuk kemudian dilakukan rencana tindak, serta inisiatif dan inovasi pengelolaan lingkungan hidup melalui program kegiatan dan kebijakan Pemerintah Kota Surakarta.

III. ANALISIS PRESSURE, STATE DAN RESPONSE TERHADAP ISU - ISU LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA SURAKARTA

Adapun analisis *Pressure State Response* (PSR) untuk masing – masing isu prioritas adalah sebagai berikut:

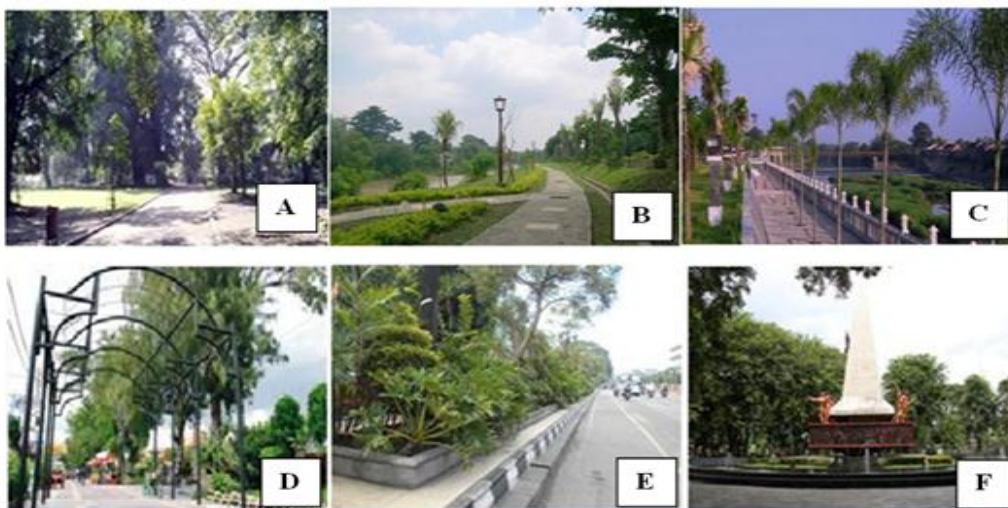
A. Tata Guna Lahan

- **Tekanan (Pressure)** terhadap masalah perubahan alih fungsi tata guna lahan di Kota Surakarta antara lain: 1). peningkatan jumlah penduduk yang berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan ruang, lahan pemukiman dan sarana/prasarana penunjang lainnya, misalnya Rumah Sakit, Pasar dll. 2). Semakin banyaknya investor yang ingin berinvestasi di Kota Surakarta. Adanya program MICE Kota Surakarta makin banyak mengundang investor di Kota Surakarta.
- **Kondisi (State).** Penggunaan lahan di Kota Surakarta berdasarkan RTRW tahun 2011-2031 secara umum terbagi atas 2 (dua) Kawasan besar yaitu Kawasan



Lindung (21,07%) dan Kawasan Budidaya (78,93%). RTH Kota Surakarta hanya sekitar 9,72%, masih jauh target yang dicanangkan adalah mencapai RTH privat sebesar 10% dan RTH Publik 20% pada tahun 2021. Secara umum, penggunaan lahan yang bertambah pada periode 3 tahun terakhir di Kota Surakarta berturut turut (mulai dari yang terbesar) adalah : pemukiman (+0,23%), perusahaan (+0,20%), jasa dan lain- lain (+0,17%). Sedangkan, penggunaan lahan dengan tren menurun pada periode tiga tahun terakhir adalah : pertanian lahan kering (-5,35%), lahan kosong (-1,29%) dan sawah (-1,28). Sedangkan yang tidak mengalami perubahan adalah Industri, Lapangan Olah Raga, Kuburan dan Hutan (Taman Kota).

- **Respon (Response).** Pemerintah Kota Surakarta berupaya dalam penanggulangan isu alih fungsi lahan yaitu dengan Penyusunan dokumen rencana tata ruang, kebijakan bangunan vertikal dalam dokumen rencana tata ruang, peningkatan pengawasan dilakukan terhadap perijinan penggunaan lahan yang sudah dikeluarkan, mengembalikan fungsi lahan dan melakukan penataan agar sesuai dengan peruntukan seperti : penataan pemukiman bantaran sungai dan ruang milik jalan; penataan jalur pedestrian; penataan taman kota; penataan pasar tradisional; penghijauan dan pembangunan RTH.



Keterangan : A. Taman Balekambang D. City Walk Jl. Slamet Riyadi
B. Taman Sekartaji E. Jalur Hijau Jl Jenderal Soedirman
C. Taman Tirtonadi F. Hutan Kota Monumen Banjarsari



B. Pencemaran Air dan Udara

B.1. Pencemaran Air

- **Tekanan (Pressure).** Tekanan yang menjadi penyebab terjadinya perubahan kondisi kualitas air yang ada di Kota Surakarta yaitu penambahan jumlah penduduk yang menyebabkan peningkatan limbah cair domestik yang tidak terkelola dengan baik. Selain itu, Adanya peningkatan sarana dan prasarana perekonomian kota Surakarta seperti industry dan UMKM/IKM, rumah sakit, sarana pendidikan, mall, hotel dan restoran, dan lainnya menyebabkan peningkatan limbah cair yang dapat menurunkan kualitas air di Kota Surakarta.
- **Kondisi (State).** Adanya peningkatan limbah cair yang tidak terkelola dengan baik menyebabkan penurunan kualitas air permukaan maupun air tanah. Dari sumber rumah sakit yang dipantau, 100% melampaui baku mutu TSS. Sedangkan sebanyak 20% rumah sakit melampaui baku mutu COD, 40% melampaui baku mutu BOD, serta 80% melampaui baku mutu amoniak. Hal ini menyebabkan air bau. Dari sumber hotel hanya TSS yang melampaui baku mutu sebanyak 100%. Dari sumber UKM tahu dan batik, terlihat sebanyak 71,43% telah melampaui baku mutu COD, dan 100% melampaui baku mutu TSS. Dari sumber RPH, 100% melampaui baku mutu TSS. Adapun kualitas air hasil pengolahan IPAL komunal yang ada di Kota Surakarta, didapatkan 100% masih melebihi baku mutu TSS, sebanyak 60% melebihi baku mutu COD, dan 80% melebihi baku mutu BOD. Hasil pemantauan kualitas 6 air sungai di Kota Surakarta menunjukkan :
 - 1) Sungai JENES (Tercemar)
 - 2) Sungai PREMULUNG (Tercemar)
 - 3) Sungai BROJO (Tercemar)
 - 4) Sungai PEPE HILIR (Tercemar)
 - 5) Sungai ANYAR (Masuk Kelas III dan IV)
 - 6) Sungai GAJAH PUTIH (Masuk Kelas III dan IV)



- **Respon (Response).** Dalam upaya penanggulangan pencemaran air, Pemerintah Kota Surakarta melaksanakan berbagai kegiatan : 1) Pelayanan pengelolaan pengolahan limbah domestik rumah tangga melalui sistem *onsite-sanitary*/ sanitasi di tempat (IPAL Komunal); *offsite-sanitary* / sanitasi sistem penyaluran limbah rumah tangga menggunakan sistem perpipaan menuju ke tempat pembuangan Air Limbah Akhir (IPAL); Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT). 2) Melakukan Pemantauan kualitas Air sungai dengan sampling dan analisis di beberapa titik hulu dan hilir sungai yang masuk program Prokasih (Program Kali Bersih); 3) Upaya pengelolaan lingkungan melalui pengawasan dan penegakan hukum dilakukan dengan mewajibkan seluruh usaha industri melaporkan kualitas air limbah dan limbah domestik dalam Laporan UKL-UPL, Sebagai bentuk ketaatan terhadap Undang – Undang Lingkungan Hidup.

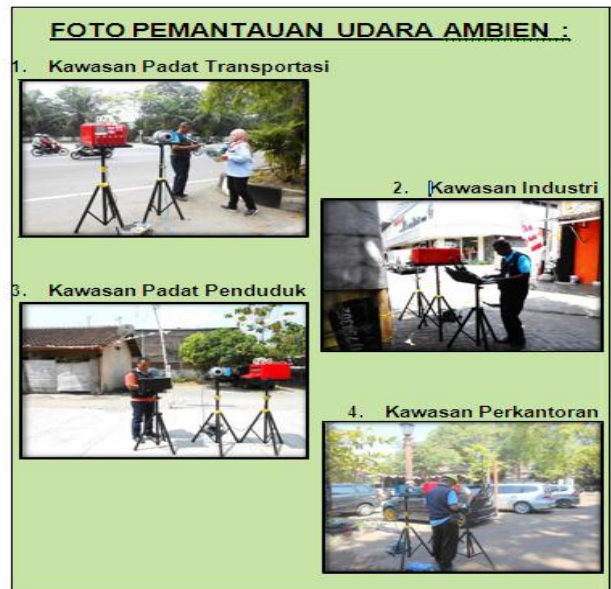
B.2. Pencemaran Udara

- **Tekanan (Pressure).** Tekanan (*pressure*) terhadap masalah pencemaran di Kota Surakarta secara umum dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk dan jumlah kendaraan bermotor di Kota Surakarta. Selain jumlah kendaraan bermotor yang ada di kota Surakarta, terdapat juga kendaraan dari luar Kota Surakarta yang masuk yang jumlahnya tidak dapat di tentukan pasti. Perekonomian Kota Surakarta ditunjang oleh kegiatan-kegiatan, seperti perdagangan, komersial, jasa dan industri UMKM. Kawasan-kawasan pusat perekonomian tersebar di seluruh wilayah Surakarta, menyebabkan mobilitas yang tinggi baik dari jumlah kendaraan bermotor yang masuk maupun yang keluar dari Kota Surakarta. Kemacetan pada jam kerja (*workhour*) mengakibatkan peningkatan akumulasi paparan polutan yang bersumber dari gas buang kendaraan bermotor (sumber bergerak). Selain hal tersebut, sebagian kecil kegiatan industri (sumber tak bergerak) juga turut menjadi faktor yang mempengaruhi kualitas udara ambien di Kota Surakarta.



- **Kondisi (State).**

Status Pencemaran Udara: Pemerintah Kota Surakarta melaksanakan pengukuran kualitas udara ambien dalam upaya pengawasan dan monitoring pada kawasan padat transportasi (*Roadside*), kawasan pemukiman dan kawasan perkantoran di 15 titik lokasi



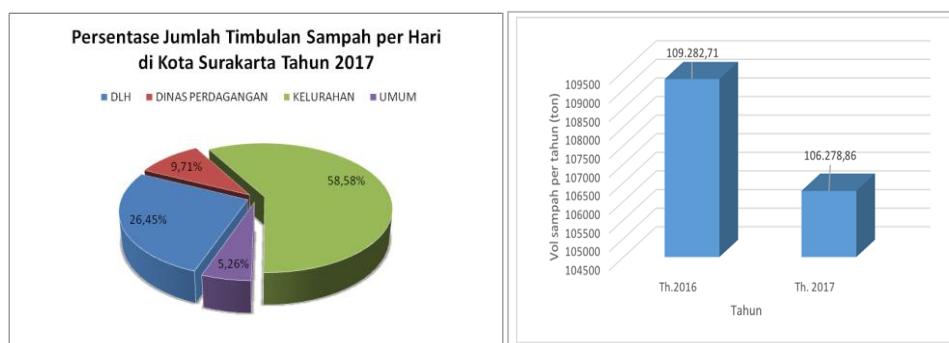
sampling yang tersebar di 5 kecamatan, meliputi parameter SO_2 , CO , NO_2 , O_3 , TSP dan Pb. Hasil Analisis kualitas udara ambien menunjukkan bahwa parameter SO_2 , NO_2 , O_3 , TSP, Pb dan CO , masih berada di bawah baku mutu kualitas udara ambien Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001, kecuali untuk TSP pada kawasan perkantoran di kecamatan Jebres melebihi baku mutu di karenakan pada saat pengambilan sample bersamaan ada proyek pembangunan Kecamatan Jebres. Berdasarkan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) kota Surakarta secara umum mengalami peningkatan dari Tahun 2016 – 2017 yaitu dari 39,33 menjadi 43,49, meskipun statusnya masih sama, yaitu waspada. Peningkatan ini mengindikasikan adanya peningkatan upaya lingkungan sehingga tingkat pencemaran menurun.

- **Respon (Response).** Pemerintah Kota Surakarta berupaya dalam penanggulangan pencemaran udara di Kota Surakarta mencakup seperti: penyelenggaraan hutan kota, jalur hijau, penanaman pohon, penghijauan, penambahan RTH, revitalisasi pedestrian *city walk*, pengujian emisi kendaraan bermotor, kegiatan *car free day (CFD)*, Pembangunan koneksi intermoda *skybridge*, Penyediaan transportasi massal yang memenuhi syarat kualitas.



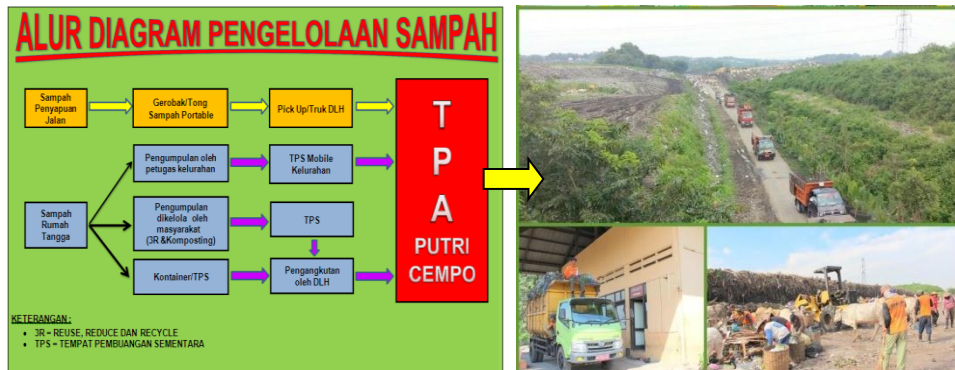
C. Sampah

- **Tekanan (Pressure).** Peningkatan jumlah penduduk dan pengunjung/wisatawan di Kota Surakarta dengan segala aktifitasnya menyebabkan peningkatan jumlah timbulan sampah. Belum optimalnya pengelolaan sampah dari sumbernya dan di TPS menyebabkan peningkatan sampah secara terus – menerus tanpa pengurangan yang signifikan. Selain itu, banyaknya PKL juga memberikan sumbangan terhadap timbulan sampah di Kota Surakarta.
- **Kondisi (State).** Berdasarkan data sampah yang masuk ke TPA Putri Cempo, Jumlah timbulan sampah rata – rata setiap harinya di Kota Surakarta adalah 1.164,70 m³/hari, dimana jumlah ini terdiri dari berbagai sumber yaitu DLH sebesar 308,07 m³/hari (26,45 %) ; Dinas Perdagangan 113,06 m³/hari (9,71 %) ; Kelurahan sebesar 682,25 m³/hari (58,58%) dan umum sebesar 61,31 m³/hari (5,26%). Hasil analisa menunjukkan bahwa ternyata timbulan sampah rumah tangga (Kelurahan) lebih dominan daripada jumlah timbulan sampah dari DLH, Dinas Perdagangan dan Umum. Berdasarkan data *timeseries* timbulan sampah dari Tahun 2016 ke Tahun 2017 mengalami penurunan dari 109.282,71 Ton/Tahun menjadi 106.278,86 Ton/Tahun atau sebesar 2,83%. Hal ini menunjukkan keberhasilan pengelolaan sampah yang dijalankan kota Surakarta yaitu melalui program Bank sampah dan 3R.



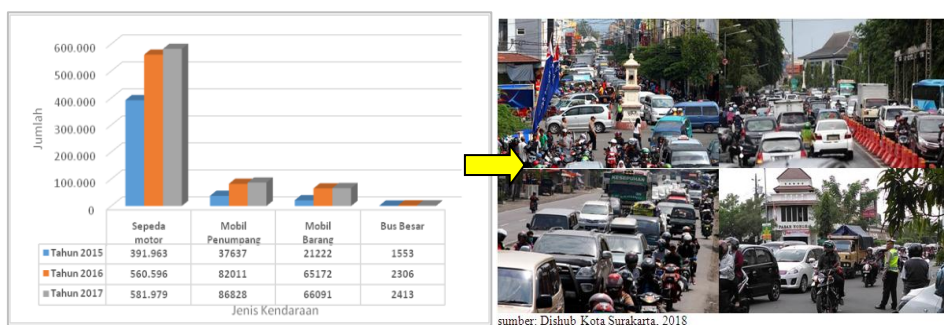
- **Respon (Response).** Respon atau tindakan yang dilakukan melalui kebijakan program dan kegiatan Pemerintah dalam upaya pengelolaan sampah di Kota Surakarta diantaranya adalah : Sosialisasi persampahan oleh DLH; Penyediaan sarana dan prasarana persampahan; Pelaksanaan 3R sampah melalui Bank

sampah; grebeg sampah, sekolah adiwiyata, Program Zero TPS/ Pengurangan TPS menjadi RTH atau taman; Pelayanan UPT Persampahan berbasis komunal; Pembenahan dan pengembangan TPA Putri Cempo untuk mendukung pembangunan PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah).



D. Kemacetan Lalu Lintas

- **Tekanan (Pressure).** Peningkatan Jumlah Kendaraan bermotor baik mobil, motor, truk baik umum maupun pribadi menyebabkan naiknya tingkat kemacetan. Selain itu dipicu juga banyaknya kendaraan yang masuk dan keluar di kota solo dari luar daerah. Adanya penyalahgunaan ruang milik jalan dan parkir liar dipinggir jalan memperparah kemacetan lalu lintas terutama untuk jalan yang sempit.



- **Kondisi (State).** Kondisi Jalan raya Kota Surakarta sudah tidak bisa bertambah lagi, berdasarkan data perubahan penambahan ruas jalan kelas I, II, IIIA, III, dan IIIC di Kota Surakarta. Data dari tahun 2014 hingga 2016, panjang perubahan penambahan ruas jalan kelas I (3,55%), kelas II (-14,95%), kelas IIIA (1,64%), dan kelas IIIC (0%). Selain itu juga terdapat 6 (enam) jalan raya yang melalui



persimpangan palang pintu kereta, sehingga arus lalu lintas menjadi terhambat karena adanya kereta yang melintas sehingga terjadi penumpukan kendaraan bermotor dan kemacetan. Terdapat 20 titik lokasi rawan kemacetan di Kota Surakarta. Titik rawan kemacetan di Kota Solo tersebut adalah: Solo Square Mall di Jalan Slamet Riyadi; Faroka di Jalan Slamet Riyadi; Solo Grand Mall di Jalan Slamet Riyadi; Bundaran Manahan di Kota Barat; Pasar Nongko; Gillingan di Nusukan; Simpang Baron di Jalan Radjiman; Solo Paragon di Jalan Yosodipuro; Simpang Joglo; Pasar Legi; Perempatan Ngemplak; Warung Pelem dan Pasar Gede; kawasan perbelanjaan di Coyudan; Simpang Samratulangi, Simpang Tirtonadi; Simpang Manahan, Simpang Dawung, Simpang RS. Dr. Oen Kandang sapi, perempatan Gading, dan Perempatan pasar Kliwon.

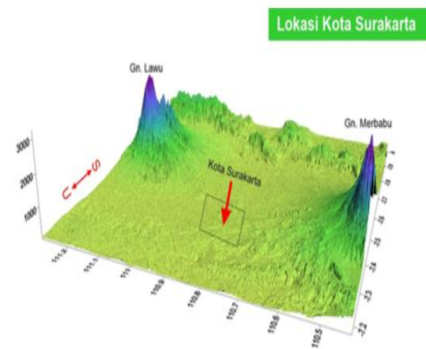
- **Respon (Response).** Upaya untuk meminimalisir atau menanggulangi masalah kemacetan di Kota Surakarta yaitu : Rekayasa lalu lintas misalnya jalan satu arah; Jalur Contraflow, Perbaikan kualitas jalan dan pelebaran jalan; Normalisasi ruang milik jalan dari bangunan dan kios; Pemerintah Kota Surakarta telah menyediakan Sarana transportasi publik yang mudah, murah dan nyaman yaitu Bus Batik Solo Trans (BST); Pemerintah Surakarta saat ini telah melakukan pembangunan *Flyover* Manahan, saat ini masih dalam tahap penyelesaian; Pemerintah Kota Surakarta juga menerapkan sanksi tegas bagi para pengguna mobil yang parkir sembarangan dan bukan pada tempatnya. Sanksi gembok roda dan denda diterapkan untuk memberikan efek jera kepada warga yang nekat parkir sembarangan pada kawasan yang dilarang parkir.





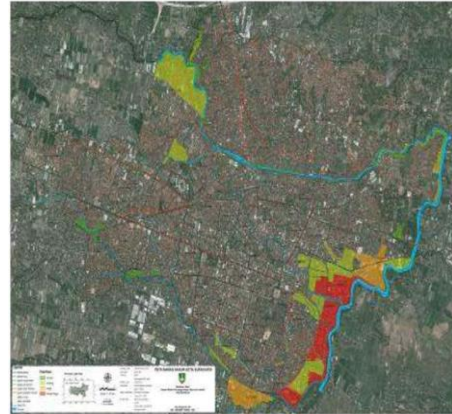
E. Banjir Genangan

- **Tekanan (Pressure).** Kota Surakarta merupakan kawasan rawan banjir secara alamiahnya, karena lokasi berada di cekungan yang diapit oleh Gunung Merbabu disisi barat, Gunung Lawu disisi timur dan Pegunungan Seribu disisi selatan. Faktor lain yang mendorong potensi besar pada terjadinya banjir, faktor banjir kiriman dari wilayah Hulu Kali Pepe dan Sungai Bengawan Solo, dan banjir lokal di dalam Kota Solo yang dipengaruhi oleh Intensitas hujan, Curah hujan, jenis tanah, topografi dan penggunaan lahan. Pertumbuhan penduduk yang mendorong kepadatan penduduk dan alih fungsi lahan menjadi lahan tertutup menyebabkan peningkatan potensi banjir. Selain hal itu terjadinya penyempitan pada beberapa badan sungai diikuti dengan sedimentasi akibat penggunaan lahan bantaran sebagai pemukiman dan Penuaan usia drainase yang mengakibatkan fasilitas tersebut tidak lagi mampu menampung air limpasan.
- **Kondisi (State).** Berdasarkan penyebabnya, banjir di Kota Surakarta di bagi menjadi 2 (dua) yaitu banjir kiriman/luapan dan banjir lokal/genangan. Pada Tahun 2017 intensitas banjir kiriman jauh berkurang dibandingkan tahun sebelumnya karena adanya pengelolaan yang lebih baik dan intensitas hujan yang lebih sedikit dibandingkan Tahun 2016. Sedangkan untuk banjir genangan masih sering terjadi pada area karangasem tepatnya di persimpangan jalan slamet riyadi dengan Jl Sawo, Sekitar stasiun purwosari, di depan taman sriwedari ke arah utara hingga Timuran, di Jayengan tepatnya sekitar Singosaren Plaza, Gajahan, Sangkrah, Gladag dan Kadipiro yaitu sekitar Jl. Mr. Sartono ke arah utara, Jayengan sekitar Jl. Honggowongso, Gading Sepanjang Jl Kaptan Mulyadi yang berada di timur Kraton, Sekitar Kali Jenes Joyosuran, Jl. Juanda di Jagalan, Jl. RE Martadinata di Gandekan, Jl Jenderal Ahmad Yani di Gilingan, perempatan Panggung, Jl. Kol. Sutarto Jebres, Unisri dan Banyuanyar.





- **Respon (Response).** Untuk meminimalisir atau menanggulangi masalah banjir, pemerintah Kota Surakarta telah melakukan beberapa upaya sebagai respon terhadap permasalahan banjir di Kota Surakarta, antara lain: Pemerintah telah menetapkan kawasan rawan banjir;



Pemerintah telah berinisiatif menambah kawasan resapan air dengan normalisasi bantaran sungai (Kali pepe), dan normalisasi ruang milik jalan dari bangunan/kios menjadi area resapan (Sumur resapan dan biopori); Pemerintah mulai merestorasi fasilitas drainase dengan pemasangan *Box Culvert*. Kota Surakarta memiliki beberapa saluran drainase yang diperbaiki secara berkelanjutan dengan total panjang **91.325 meter** dan volume sekitar **426.300 m³** yang tersebar seluruh kota Surakarta.

IV. INOVASI DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Misi, tujuan dan sasaran pada RPJMD Kota Surakarta 2016 - 2021 diwujudkan dalam program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah Kota Surakarta. Tujuan dan sasaran tersebut terkait dengan perbaikan kualitas lingkungan atau juga bergantung pada kualitas lingkungan yang berupa daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD yang optimal. Dengan tujuan dan sasaran RPJMD yang bergantung pada kualitas lingkungan maka secara tidak langsung Pemerintah Kota Surakarta akan mensinergikan program dan kegiatan OPD terkait untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tersebut.



Inovasi daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Surakarta yaitu melakukan peningkatan kapasitas lembaga daerah melalui pengembangan jejaring kerja, penerbitan produk hukum bidang pengelolaan lingkungan hidup, transparansi dan akuntabilitas kepada publik serta pembangunan infrastruktur fisik. Selain itu juga dilakukan pembagunan non-fisik yaitu melalui peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup antara lain pembentukan Pokja Sungai,

Sosialisasi Padat Karya, Proklim, Kegiatan Bank sampah dan 3R, Program Sekolah Adiwiyata, dan kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat/Komunitas Lingkungan seperti gerakan bulan menanam, pembuatan lubang resapan biopori, sosialisasi terkait lingkungan hidup, grebeg sampah, Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Peringatan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional, Peringatan Hari Bumi, Peringatan Hari Air Sedunia, Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional dan Peringatan Earth Hour.



Normalisasi Kali



V. PENUTUP

Pengelolaan lingkungan hidup khususnya di Kota Surakarta merupakan tanggungjawab kita semua, kerjasama lintas sektoral antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Surakarta, Perguruan Tinggi, Swasta/Perusahaan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Organisasi Lingkungan Hidup Surakarta serta lapisan masyarakat lainnya. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa ketersediaan data dan informasi yang akurat merupakan salah satu prasyarat utama untuk menghasilkan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang efisien dan efektif. Dengan adanya Dokumen IKPLHD Kota Surakarta Tahun 2018 diharapkan dapat mendukung proses dalam pengambilan keputusan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Surakarta.



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH**



**Jl. Menteri Supeno No.10, Manahan,
Banjarsari, Kota Surakarta,
Jawa Tengah 57139**